



**IMPLEMENTASI RESTITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR
1/RES.PID/2023/PN BKT)**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Gelar Magister Hukum*

Oleh:

Yogie Fachrie

Nim. 2220113004

Pembimbing:

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**IMPLEMENTASI RESTITUSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR
1/RES.PID/2023/PN BKT)**

**(Yogie Fachrie, NIM. 2220113004, 117 Halaman, Program Studi Magister
Hukum, Universitas Andalas, 2025)**

Abstrak

Ketika hukuman restitusi (ganti rugi) tidak disanggupi pelaku karena satu dan lain alasan maka alternatif lain yang digunakan biasanya berupa pidana pengganti. Dengan mempelajari penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt yang tidak memformulasikan pidana pengganti maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan kesulitan untuk melakukan eksekusi penetapan tersebut. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi restitusi oleh JPU terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt? 2) Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt? 3) Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan restitusi baik berdasarkan putusan pengadilan maupun penetapan hakim dalam hal restitusi tidak dibayarkan kepada anak korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis). Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun hasil penelitian dan analisis ialah : 1) Jaksa tidak bisa serta merta melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku apabila dalam pelaksanaannya terpidana/ termohon tidak mampu untuk membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh hakim, sehingga penetapan hakim tidak bisa dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum 2) bahwa pertimbangan hukum penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt belum sedikitpun menyinggung tentang perlindungan hukum terhadap anak mengingat perkara yang dihadapi ialah anak sebagai korban tindak pidana yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus selesai lewat cara-cara melebihi (*beyond*) hukum. 3) Kendala yang ditemukan terhadap pelaksanaan restitusi berdasarkan penetapan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum (regulasi), faktor penegak hukum (aparatur penegak hukum), faktor masyarakat (individu).

Kata kunci: Implementasi Restitusi, Tindak Pidana, Penetapan Pengadilan.

**IMPLEMENTATION OF RESTITUTION BY PROSECUTOR TOWARDS
CHILD VICTIMS IN CRIMINAL CASES (CASE STUDY DETERMINATION
NUMBER 1/RES.PID/2023/PN BKT)**

**(Yogie Fachrie, SID. 2220113004, 117 Pages, Master of Law Studies Program
University of Andalas, 2025)**

Abstract

When restitution (compensation) cannot be fulfilled by the perpetrator for various reasons, an alternative that is usually used is a substitute punishment. By examining Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, which does not formulate a substitute punishment, the Public Prosecutor (JPU) will encounter difficulties in executing the determination. To further study this issue, the problems addressed in this thesis are : 1) How is the implementation of restitution by the Public Prosecutor for child victims of criminal acts based on Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt?, 2) hat are the judge's considerations in determining restitution for child victims of criminal acts based on Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt?, 3) hat are the obstacles encountered in the implementation of restitution, whether based on court verdicts or judicial determinations, in cases where restitution is not paid to child victims of criminal acts?. This study employs empirical (sociological) legal research. The research approach used includes the statutory approach and case approach through Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, with the research being descriptive in nature. The findings and analysis are as follows: 1) The prosecutor cannot directly seize the perpetrator's assets if the convict/respondent is unable to pay the restitution as determined by the judge, resulting in the judge's determination being unenforceable by the Public Prosecutor. 2)The legal considerations in Court Determination Number 1/Res.Pid/2023/PN Bkt do not mention legal protection for children at all, even though the case involves a child as a victim of a criminal act. According to existing laws and regulations, such cases must be resolved through approaches that go beyond formal legal mechanisms. 3) The obstacles found in the implementation of restitution based on the judge's determination are influenced by several factors Legal factors (regulations), Law enforcement factors (law enforcement officers), Community factors (individuals)

Keywords: Implementation of Restitution, Crime, Court Determination.